

UPAYA ASEAN REGIONAL FORUM DALAM MENGHADAPI SENGKETA LAUT CINA SELATAN TAHUN 2021-2023

Oleh : Muhammad Dhafa Amardi

Pembimbing : AhmadFuadi

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis dengan potensi konflik tinggi akibat klaim kedaulatan yang tumpang tindih, terutama klaim sepihak Cina melalui *nine-dash line* yang berseberangan dengan kepentingan negara-negara ASEAN. Kawasan ini bernilai strategis secara ekonomi dan geopolitik karena melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Dalam konteks ini, ASEAN dipahami sebagai *Regional Security Complex* yang berupaya menjaga stabilitas kawasan melalui mekanisme konsensus atau ASEAN Way dengan menekankan kerja sama, dialog, dan *preventive diplomacy*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta berlandaskan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang menyoroti keterhubungan antarnegara dalam menghadapi isu keamanan kawasan. Melalui pendekatan ini, ARF dianalisis berdasarkan empat-elemen utama batasan wilayah, struktur anarkis, pola interaksi keamanan, dan polarisasi kekuatan untuk memahami dinamika keamanan Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan. ARF berperan membangun kepercayaan, memfasilitasi diplomasi preventif, dan mendorong konsensus regional, meski terbatas oleh prinsip non-intervensi dan perbedaan kepentingan anggota.

Temuan penelitian menunjukkan ARF berfungsi sebagai wadah dialog inklusif melalui inisiatif seperti *confidence-building measures*, pertemuan maritim, dan pembahasan *Code of Conduct* (COC). Namun, hasil konkret penyelesaian sengketa masih terbatas akibat perbedaan posisi antarnegara dan pengaruh persaingan Cina-AS. Dengan demikian, peran utama ARF terletak pada menjaga komunikasi diplomatik dan mencegah eskalasi konflik terbuka, meskipun belum menghasilkan solusi substantif.

Kata Kunci: Laut Cina Selatan, ASEAN Regional Forum, *Regional Security Complex Theory*, Keamanan Regional

ABSTRACT

The South China Sea is a strategic area with a high potential for conflict due to overlapping sovereignty claims, particularly China's unilateral nine-dash line claim, which conflicts with the interests of ASEAN member states. This region holds strategic value not only economically but also geopolitically, as it involves

major powers such as the United States. In this context, ASEAN is understood as a Regional Security Complex that seeks to maintain regional stability through a consensus-based mechanism known as the ASEAN Way, emphasizing cooperation, dialogue, and preventive diplomacy.

This study employs a qualitative method with a literature review approach and is grounded in the Regional Security Complex Theory (RSCT), which highlights the interconnectedness among states in addressing regional security issues. Through this framework, the ASEAN Regional Forum (ARF) is analyzed based on four key elements territorial boundaries, anarchic structure, security interaction patterns, and power polarization to understand the security dynamics in Southeast Asia, particularly in the South China Sea. ARF serves to build trust, facilitate preventive diplomacy, and promote regional consensus, although its implementation remains constrained by the principle of non-interference and differing national interests.

The findings show that ARF functions as an inclusive dialogue platform through initiatives such as confidence-building measures, maritime meetings, and discussions on the Code of Conduct (CoC). However, concrete results in dispute resolution remain limited due to differing positions among ASEAN members and the influence of strategic rivalry between China and the United States. Thus, ARF's primary role lies in maintaining diplomatic communication and preventing open conflict escalation, even though it has yet to produce substantive solutions.

Keywords: South China Sea, ASEAN Regional Forum, Regional Security Complex Theory, Regional Security

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu kawasan paling strategis sekaligus rawan konflik di abad ke-21. Perselisihan klaim wilayah laut dan daratan, terutama klaim sepihak oleh Cina melalui “sembilan garis putus-putus” (*nine-dash line*), tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia.¹ Sengketa ini tidak hanya menyangkut perebutan wilayah dan sumber daya, tetapi juga menyangkut stabilitas dan

keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Konflik ini menjadi penting karena beberapa alasan utama. Pertama, Laut Cina Selatan merupakan jalur vital perdagangan global yang dilalui barang bernilai triliunan dolar setiap tahun. Kedua, kawasan ini menyimpan cadangan minyak, gas, dan hasil laut yang besar sehingga memicu persaingan penguasaan sumber daya. Ketiga, kebangkitan militer Cina dan kebijakan *freedom of navigation* Amerika Serikat meningkatkan ketegangan dan risiko benturan langsung di lapangan. Akibatnya, isu ini telah berkembang dari sengketa teritorial menjadi persoalan keamanan regional yang kompleks dan berpotensi

¹ Dwi Putri Rachmawati, “Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna,” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225>.

mengguncang keseimbangan kawasan.²

Dalam menghadapi dinamika tersebut, penyelesaian damai berbasis hukum internasional, terutama *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, menjadi keharusan. Di tingkat regional, ASEAN berperan penting sebagai wadah kerja sama dan stabilitas melalui prinsip *ASEAN Way* yang menekankan dialog, konsensus, dan diplomasi preventif. Salah satu instrumen utama ASEAN dalam mengelola isu keamanan kawasan adalah ASEAN Regional Forum (ARF), ARF berfungsi membangun kepercayaan, mencegah konflik, serta memfasilitasi kerja sama dalam keamanan maritim dan diplomasi multilateral. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena prinsip *non-interference*, perbedaan kepentingan antaranggota, serta kompleksitas klaim historis dan geopolitik yang sulit disatukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ASEAN Regional Forum (ARF) berupaya menghadapi sengketa Laut Cina Selatan pada periode 2021–2023 dan sejauh mana efektivitas peran diplomasi multilateralnya. Pemahaman terhadap tantangan dan hambatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan mekanisme ARF sebagai

instrumen perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

KERANGKA TEORI

Teori: Regional Security Complex

Penelitian ini menggunakan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* dari Barry Buzan, yang menjelaskan bahwa keamanan bersifat regional karena negara-negara berdekatan saling memengaruhi dalam hal ancaman dan kepentingan. RSCT menyoroti empat elemen utama:

1. Batas wilayah (*boundaries*), yang jelas, yang bisa bersifat geografis, politik, atau budaya, dan berfungsi memisahkan satu kompleks keamanan dari yang lain.
2. Struktur anarkis (*anarchic structure*). Ini merujuk ada ketiadaan otoritas tunggal yang berwenang mengatur keamanan negara-negara didalamnya.
3. Pola interaksi keamanan (*patterns of security interaction*). Pola ini mencakup kerjasama, rivalitas, bahkan konflik terbuka yang intens dan berkelanjutan antarnegara di kawasan.
4. Polarisasi kekuatan (*Polarity*). Adalah distribusi kekuatan militer, ekonomi, dan politik didalam suatu kawasan.

Teori ini menggabungkan pendekatan materialis yang menekankan distribusi kekuatan dengan pendekatan konstruktivis yang melihat keamanan sebagai hasil proses sosial melalui sekuritisasi.³ Dalam konteks Laut Cina Selatan, sekuritisasi terjadi ketika tindakan

² Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan dan Nabilla Kharisma Ardhaneswari, "Konstelasi geopolitik tiongkok di laut china selatan: studi kasus reklamasi dan militerisasi pulau buatan oleh tiongkok di kepulauan spratly," *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 3 (2022): 49–76.

³ Barry Buzan dan Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, vol. 7, 2003, <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800026>.

sepihak seperti militerisasi Cina atau patroli Amerika Serikat dipandang mengancam stabilitas kawasan. ASEAN Regional Forum (ARF) berperan sebagai arena dialog dan diplomasi preventif untuk mengelola isu tersebut. RSCT membantu menjelaskan bagaimana ARF berfungsi menjaga stabilitas regional meski efektivitasnya masih terbatas.

Tingkat Analisa: Kelompok Negara-negara

Penentuan tingkat analisis diperlukan untuk memahami fenomena hubungan internasional secara terarah. Menurut Mohtar Mas'ood, terdapat lima tingkat analisis, yakni individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara, dan sistem global. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok negara (*regional level*) karena fokusnya pada interaksi antarnegara dalam satu kawasan yang membentuk pola kerja sama regional.⁴

ASEAN Regional Forum (ARF) dipahami sebagai aktor kolektif yang mewakili kepentingan negara-negara Asia Tenggara dan mitra eksternal dalam mengelola isu keamanan kawasan. Melalui kerangka ini, penelitian menilai bagaimana ARF berfungsi sebagai mekanisme diplomasi multilateral untuk menjaga stabilitas dan menangani sengketa Laut Cina Selatan secara damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya. Pendekatan ini berfokus pada proses,

makna, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan secara sistematis situasi, hubungan, serta dinamika yang muncul dalam peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. Pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling tepat karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap upaya diplomasi multilateral dan interaksi keamanan regional di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN Regional Forum (ARF)

ASEAN Regional Forum (ARF) dibentuk pada tahun 1994 sebagai upaya ASEAN memperluas perannya dari kerja sama ekonomi menuju keamanan kawasan Asia-Pasifik. Lahir dari dinamika pasca-Perang Dingin dan kebutuhan menjaga stabilitas regional, ARF menjadi wadah dialog inklusif antara negara-negara ASEAN dan mitra eksternal seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Uni Eropa. Forum ini bersifat *non-binding* dan berfungsi membangun kepercayaan, mendorong diplomasi preventif, serta penyelesaian damai atas potensi konflik, termasuk sengketa Laut Cina Selatan. Pembentukan ARF mencerminkan transformasi ASEAN menjadi aktor utama keamanan kawasan melalui prinsip *ASEAN Way* yang menekankan konsensus, musyawarah, dan non-intervensi.⁵ ASEAN Regional Forum (ARF) dibentuk untuk mempromosikan

⁴ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi," 1990.

⁵ ASEAN, "The First ASEAN Regional Forum," 1994.

dialog politik-keamanan, membangun kepercayaan, dan mendorong diplomasi preventif di kawasan Asia-Pasifik. Forum ini berlandaskan prinsip *ASEAN Way* yang menekankan non-intervensi, konsensus, dan kesetaraan antaranggota, dengan ASEAN sebagai *driving force*. Melalui pendekatan bertahap *Confidence Building Measures*, *Preventive Diplomacy*, dan *Conflict Resolution* ARF berupaya menciptakan stabilitas dan perdamaian regional melalui kerja sama dan dialog yang inklusif.⁶

Struktur organisasi ARF merupakan gabungan dari beberapa elemen: kepemimpinan formal yang bergilir (Ketua ARF dan Ketua SOM), mekanisme teknis dan pendukung (seperti ISG, ISM, dan Unit ARF), serta kontribusi dari pihak non-pemerintah melalui Jalur II. Struktur ini menunjukkan bahwa ARF adalah forum dialog yang fleksibel namun memiliki alur kepemimpinan yang teratur.

ASEAN Regional Forum (ARF) memiliki mekanisme kerja yang terstruktur dan fleksibel untuk menangani beragam isu keamanan, baik tradisional maupun nontradisional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen negara-negara anggota dalam melaksanakan kesepakatan. ARF lebih menonjol sebagai forum konsultatif untuk membangun rasa saling percaya, bukan sebagai entitas yang dapat memaksakan penyelesaian konflik secara mengikat.

Dinamika Laut Cina Selatan

⁶ "The ASEAN Regional Forum : A Concept Paper," n.d.

Konflik Laut Cina Selatan berkembang dari sengketa historis menjadi isu keamanan regional. Setelah UNCLOS berlaku, Cina memperkuat klaim sembilan garis putus-putus dan membangun fasilitas militer, memicu ketegangan dengan ASEAN.⁷ Upaya diplomatik gagal menahan eskalasi, putusan PCA 2016 diabaikan, dan aktivitas maritim Cina makin agresif, menjadikan konflik ini ancaman bagi stabilitas kawasan.

Cina mengklaim sekitar 80% Laut Cina Selatan melalui peta sembilan garis putus-putus tahun 1947 dengan alasan "hak historis," meski bertentangan dengan UNCLOS 1982.⁸ Klaim ini didorong oleh kepentingan ekonomi, politik, dan militer: menguasai sumber daya dan jalur perdagangan, memperkuat posisi regional, serta menahan pengaruh Amerika Serikat. Melalui reklamasi dan militerisasi pulau di Spratly, Cina berupaya menciptakan fakta di lapangan dan menegaskan Laut Cina Selatan sebagai bagian dari kepentingan inti nasional dalam mewujudkan visi "*China Dream*."

Respon negara-negara ASEAN terhadap klaim "nine-dash line" Cina di Laut Cina Selatan berbeda-beda karena kepentingan nasional yang beragam. Filipina dan Vietnam

⁷ Ding Hongbin dan Ihsan Ullah, "the South China Sea's Nine Dash Line: Key Disputes and China's Historical Rights Claims," *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, no. 1 (2022): 67–86, <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>.

⁸ Robert Beckman, "China, UNCLOS and the South China Sea," *Asian Society of International Law, Third Biennial Conference, Beijing, China 27-28 August 2011*, no. August (2011): 1–32.

menolak tegas klaim tersebut Filipina lewat jalur hukum internasional, Vietnam dengan memperkuat militer dan diplomasi.⁹ Malaysia dan Brunei memilih pendekatan hati-hati untuk menjaga hubungan ekonomi dengan Cina. Sedangkan Indonesia menegaskan kedaulatan di Natuna dan berperan sebagai mediator regional.¹⁰ Singapura bersikap netral namun aktif mendorong supremasi hukum dan solidaritas ASEAN, sementara Kamboja dan Laos condong berpihak pada Cina karena ketergantungan ekonomi yang tinggi. Sengketa Laut Cina Selatan mengancam stabilitas kawasan karena melanggar hukum internasional, memicu ketegangan politik, dan mengganggu jalur perdagangan. Klaim sepihak seperti *nine-dash line* serta aktivitas militer memperlemah kerja sama ASEAN dan menurunkan kepercayaan global, sehingga berdampak pada keamanan regional dan ekonomi dunia.¹¹

Mekanisme Kerja ASEAN Regional Forum Dalam Sengketa Laut Cina Selatan

ASEAN Regional Forum (ARF) berperan sebagai wadah kolektif untuk mengelola dinamika kawasan yang multipolar, dengan keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika

Serikat, Jepang, dan Australia. Hubungan antarnegara di kawasan ini menunjukkan campuran antara solidaritas dan ketegangan, terutama dalam konteks insiden maritim dengan Cina. Untuk menjaga stabilitas, ARF menerapkan mekanisme *three-stage process*: *Confidence-Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD), dan *Conflict Resolution* (CR), yang saling beririsan dalam praktiknya.¹²

Tahap *Confidence-Building Measures* (CBMs) menjadi pondasi utama ARF melalui langkah-langkah seperti pertukaran informasi pertahanan, latihan bersama, dan kerja sama maritim. Forum ini mengadakan pertemuan seperti *Inter-Sessional Meetings on Maritime Security* dan latihan kemanusiaan *DiREx* untuk memperkuat interoperabilitas. Upaya ini sejalan dengan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang menekankan keterkaitan keamanan antarnegara di kawasan. Dalam tahap *Preventive Diplomacy* (PD), ARF berupaya mencegah eskalasi melalui pernyataan politik seperti *Chairman's Statement* dan pertemuan teknis *Senior Officials' Meetings* (SOM) yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Meski dibatasi prinsip non-intervensi, PD membantu menjaga komunikasi terbuka di tengah ketegangan dengan Cina.

⁹ Mohammad Alvian Adi Nugroho dan M. Miftahul Hikam, "South China Sea Claim Dispute Settlement Between Asean and China," *Trunojoyo Law Review* 2, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i1.9478>.

¹⁰ Nugroho dan Hikam.

¹¹ Rifqi Setia Wardhana, "The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 3, no. 1 (2021): 23–33, <https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.56>.

¹² Saidatul Nadia Abdul Aziz dan Salawati Mat Basir, "De-centrality of ASEAN Law to Address US-China Rivalry in the South China Sea," *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (2024): 61–88, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1747>.

Sementara itu, tahap *Conflict Resolution* (CR) menjadi bagian paling lemah karena ARF tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksakan penyelesaian sengketa. Namun, forum ini tetap memainkan peran normatif melalui dukungan terhadap *Declaration on the Conduct of Parties* (DoC) dan dorongan penyelesaian *Code of Conduct* (CoC) yang sesuai UNCLOS 1982.¹³ Melalui berbagai pertemuan sepanjang 2021–2023, ARF menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Secara keseluruhan, meskipun belum mencapai resolusi konflik yang substantif, ARF tetap menjadi instrumen penting dalam mengelola keamanan di Laut Cina Selatan dengan memperkuat kepercayaan, mencegah eskalasi, dan mempertahankan komunikasi antarnegara di bawah kerangka RSCT.

Penjagaan Batas Wilayah Oleh ASEAN Regional Forum

Isu delimitasi maritim menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika keamanan Asia Tenggara, terutama di Laut Cina Selatan. ASEAN Regional Forum (ARF) menjadikan UNCLOS 1982 sebagai acuan utama dalam menetapkan batas laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Norma ini diperkuat melalui *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) 2002 yang menegaskan penyelesaian damai dan penahanan diri dari tindakan sepihak. Meskipun bersifat deklaratif, DOC

tetap menjadi dasar normatif menuju pembentukan *Code of Conduct* (COC) yang lebih mengikat secara hukum.¹⁴

Pertemuan ARF ke-28 tahun 2021 menegaskan kembali UNCLOS sebagai landasan hukum internasional di tengah ketegangan akibat kehadiran kapal Cina di Whitsun Reef. Pernyataan bersama menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. ARF juga memperkuat kerja sama teknis melalui *Inter-Sessional Meeting on Maritime Security* (ISM-MS) dan *Preventive Diplomacy Workshops*, yang menunjukkan komitmen nyata forum ini dalam membangun kepercayaan dan mengurangi risiko konflik di kawasan.

Pada tahun 2022, ARF ke-29 menegaskan konsistensi dalam menempatkan UNCLOS dan DOC sebagai dasar hukum, sekaligus mendorong percepatan pembentukan COC. Fokus bergeser dari sekadar penguatan norma menuju implementasi konkret. Forum menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari tindakan yang memperburuk situasi. ARF juga menyelenggarakan *Workshop on Maritime Law Enforcement* untuk memperkuat penegakan hukum laut, menjadikan UNCLOS bukan hanya

¹³ Mikael Weissmann, "The South China sea conflict and Sino-ASEAN relations: A study in conflict prevention and peace building," *Asian Perspective* 34, no. 3 (2010): 35–69, <https://doi.org/10.1353/apr.2010.0013>.

¹⁴ ASEAN Regional Forum, "Co-Chairs' Summary Report Asean Regional Forum Inter-Sessional Support Group Meeting On Confidence-Building Measures And Preventive Diplomacy (ARF ISG ON CBMs AND PD) Video Conference, 2 July 2020," 2020.

pedoman normatif, tetapi juga instrumen kerja sama teknis.¹⁵

Pertemuan ARF ke-30 pada 2023 di Jakarta memperlihatkan kesinambungan dan arah baru. Forum menekankan bahwa COC harus bersifat “substantive and effective”, bukan sekadar deklaratif. ARF juga memperluas agenda ke isu teknis seperti *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, memperlihatkan upaya menjaga relevansi norma hukum laut dengan praktik di lapangan. Namun, implementasi tetap terbatas karena perbedaan kepentingan negara anggota dan aktivitas sepihak Cina. Dengan demikian, ARF 2023 berperan sebagai jembatan antara norma lama (UNCLOS, DOC) dan instrumen baru (COC).

ARF menunjukkan konsistensi dalam menjadikan UNCLOS dan DOC sebagai pijakan utama serta mendorong transisi menuju COC yang lebih substantif. Proses menuju COC mencerminkan bentuk sekuritisasi, di mana isu delimitasi maritim dan kebebasan navigasi dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Meskipun ARF lebih berperan sebagai pembentuk norma daripada penegak aturan, forum ini tetap berkontribusi memperkuat kohesi regional dan menjaga isu Laut Cina

Selatan dalam koridor hukum internasional.¹⁶

Strategi Hedging ASEAN Regional Forum

Strategi keamanan dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) mencerminkan upaya ASEAN menghadapi dinamika Laut Cina Selatan dengan menyeimbangkan kepentingan hukum internasional dan interaksi dengan kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat. Dalam konteks teori hubungan internasional, strategi ASEAN terlihat melalui tiga pola utama *balancing*, *hedging*, dan *bandwagoning* yang berjalan secara bersamaan selama periode 2021–2023. ARF, sebagai forum multilateral yang bersifat konsultatif, berfungsi membingkai isu keamanan kawasan melalui *Chairman's Statement* dan mekanisme dialog, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada ranah normatif tanpa langkah koersif.

Sejak *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) tahun 2002, ASEAN berkomitmen menjaga stabilitas kawasan dengan berlandaskan UNCLOS 1982, namun lemahnya implementasi membuat strategi berkembang ke arah *hedging*. Setelah meningkatnya aktivitas militerisasi Cina pasca-2010, ASEAN mempertahankan hubungan ekonomi-politik dengan Beijing sambil menegaskan penghormatan

¹⁵ Jonni Mahroza, Priyanto, dan Mhd Halkis, “Asymmetric Diplomacy and Securitization in The South China Sea,” *Andalas Journal of International Studies* 11, no. 1 (2022): 94–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/ajis.11.1.94-107.2022>.

¹⁶ Jaime Naval, “ASEAN’s elusive code of conduct for the South China Sea,” EASTASIAFORUM, 2024, <https://eastasiaforum.org/2024/11/21/asean-elusive-code-of-conduct-for-the-south-china-sea/>.

terhadap hukum internasional.¹⁷ Dalam periode 2021, ARF menekankan *confidence-building measures* (CBMs) dan kerja sama maritim untuk mencegah eskalasi konflik, sedangkan Vietnam dan Filipina menunjukkan kecenderungan *balancing*, sementara Kamboja dan Laos memilih *bandwagoning* terhadap Cina.¹⁸

Pada tahun 2022, ARF menegaskan pentingnya menahan diri (*self-restraint*) dan mempercepat perundingan *Code of Conduct* (COC) sebagai langkah menuju stabilitas kawasan. Forum ini mendorong koordinasi keamanan maritim, pertukaran informasi, serta dialog rutin antarpejabat keamanan. Sikap kolektif ASEAN masih bersifat *hedging*, dengan Vietnam dan Filipina semakin tegas terhadap Cina, sedangkan Kamboja selaku Ketua ASEAN lebih menonjolkan agenda ekonomi. Bahasa diplomatik dalam *Chairman's Statement* tetap netral dan menghindari penyebutan aktor tertentu, menunjukkan karakter khas *soft balancing* sekaligus *pragmatic bandwagoning* demi menjaga kesatuan politik ASEAN.¹⁹

Tahun 2023 menunjukkan konsistensi pola serupa dengan penekanan pada percepatan penyusunan COC yang "substantive

and effective." ARF memperkuat koordinasi patroli maritim dan transparansi aktivitas militer, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian damai berdasarkan UNCLOS 1982. Vietnam dan Filipina memperlihatkan posisi *balancing* yang semakin kuat melalui diplomasi aktif dan kerja sama eksternal, sedangkan Kamboja dan Laos tetap berada di jalur *bandwagoning*. Fragmentasi internal ASEAN kian tampak, menjadikan ARF lebih berfungsi sebagai arena negosiasi posisi daripada wadah kebijakan kolektif yang solid.²⁰

Secara keseluruhan, ARF berperan sebagai bentuk *institutional hedging* yang menjaga ruang manuver ASEAN. Melalui prinsip konsensus dan non-intervensi, forum ini memfasilitasi *confidence-building measures* serta dialog keamanan multilateral untuk mencegah eskalasi konflik. Meski terbatas oleh sifatnya yang tidak mengikat dan perbedaan kepentingan antaranggota, ARF tetap menjadi instrumen strategis dalam proses sekuritisasi isu Laut Cina Selatan menyeimbangkan kepentingan, menegakkan norma hukum internasional, dan mempertahankan stabilitas kawasan melalui diplomasi inklusif khas Asia Tenggara.

Pola Interaksi Keamanan

Pola interaksi keamanan dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan dinamika multidimensi yang melibatkan diplomasi formal, inisiatif non-pemerintah, hingga kerja sama non-tradisional. *Track II diplomacy* seperti workshop yang

¹⁷ ASEAN, "Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea," 2002, 1–4.

¹⁸ ASEAN Regional Forum, "Chairman's Statement of the 28th ASEAN Regional Forum 6 August 2021 via videoconference," 2021.

¹⁹ ASEAN Secretariat, "Chairman's Statement of the 29th ASEAN Regional Forum, Phnom Penh, Cambodia, 5 August 2022," ASEAN Secretariat, no. August (2022): 1–9.

²⁰ ASEAN Regional Forum, "Chairman's Statement Of The 30th Asean Regional Forum," 2023.

difasilitasi Kanada sejak 1990-an berperan penting dalam membangun komunikasi lintas negara secara non-konfrontatif. Namun, diplomasi saja tidak cukup, sebab beberapa negara seperti Indonesia juga menerapkan strategi *defensive deterrence* melalui patroli, penguatan infrastruktur militer, dan penegasan kedaulatan di Natuna. Langkah ini memperlihatkan adanya dilema keamanan karena tindakan pertahanan sering dipersepsikan sebagai bentuk eskalasi oleh pihak lain.²¹

Selain diplomasi dan deterrence, kerja sama keamanan juga dilakukan melalui modernisasi militer dan diplomasi pertahanan. Negara-negara ASEAN memperkuat kapabilitas maritim, melakukan latihan gabungan, serta memperluas kerja sama multilateral untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan posisi tawar dalam negosiasi. Sementara itu, dimensi non-tradisional seperti *blue economy* dan kerja sama maritim berkelanjutan semakin menonjol, menandakan bahwa laut tidak hanya menjadi arena sengketa geopolitik, tetapi juga sumber pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan melalui pengelolaan sumber daya serta perlindungan ekosistem laut.

Dalam konteks tersebut, ASEAN Regional Forum (ARF) berperan aktif melalui berbagai program seperti *ARF Training on Ferry Safety Capacity Building* (2021) dan *4th ARF Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation* (2022). Kegiatan ini merupakan bagian dari *confidence-*

building measures (CBMs) yang menekankan transparansi, peningkatan kapasitas, dan kerja sama teknis tanpa menyinggung isu politik sensitif. Upaya tersebut memperkuat norma kolektif mengenai keselamatan pelayaran, penegakan hukum maritim, serta pencegahan kesalahpahaman antar lembaga penegak hukum.²²

Pada tahun 2023, ARF melanjutkan agenda tersebut melalui *ARF Workshop on International Cooperation on Maritime Law Enforcement (MLEN Workshop)* yang menitikberatkan pada koordinasi antar lembaga penegak hukum maritim dan peningkatan *Maritime Domain Awareness (MDA)*. Forum ini membangun prosedur komunikasi cepat untuk mencegah insiden maritim dan memperkuat protokol bersama terkait intersepsi kapal, pelanggaran batas, atau tabrakan di wilayah sengketa. Pendekatan ini menunjukkan penerapan diplomasi keamanan non-tradisional yang menekankan komunikasi, transparansi, dan koordinasi untuk menjaga stabilitas kawasan tanpa jalur militer.

Secara keseluruhan, pola interaksi keamanan yang difasilitasi ARF mencerminkan proses sekuritisasi kolektif dalam kerangka *Regional Security Complex Theory (RSCT)*, di mana isu maritim dikonstruksi sebagai ancaman bersama yang

²¹ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, "ASEAN Blue Economy Framework," *ASEAN, Indonesia*, 2023, 1–22.

²² EEAS Press Team, "4th ASEAN Regional Forum Workshop on Enhancing Regional Maritime Law Enforcement Cooperation," European Union EXTERNAL ACTION, 2022, https://www.eeas.europa.eu/eeas/4th-asean-regional-forum-workshop-enhancing-regional-maritime-law-enforcement-cooperation_en.

memerlukan tanggapan institusional. ARF menjadi wadah bagi negara-negara, termasuk Cina, untuk mengadopsi norma bersama seperti penghormatan terhadap *UNCLOS* dan kebebasan navigasi. Stabilitas regional pun dipelihara melalui kombinasi diplomasi, deterrence, kerja sama teknis, dan *confidence-building measures* yang menjadikan Laut Cina Selatan sebagai ruang interaksi kooperatif, bukan konfrontatif.

Polarisasi Kekuatan

Polarisasi kekuatan di Asia Tenggara mencerminkan dinamika kompleks dalam sengketa Laut Cina Selatan. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF), negara-negara ASEAN berupaya menegakkan prinsip *UNCLOS 1982* dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC 2002)*, namun perbedaan kepentingan tetap menimbulkan ketegangan. Filipina dan Vietnam menolak klaim Cina dengan memperkuat pertahanan dan menjalin kemitraan militer dengan Amerika Serikat, sedangkan Malaysia dan Indonesia menempuh jalur diplomasi serta kerja sama multilateral. Sementara itu, Brunei dan Laos memilih posisi pasif, dan Kamboja cenderung mendukung Cina karena ketergantungan ekonomi dan politik. Ketimpangan kemampuan militer menciptakan pola *asymmetric balancing*, di mana negara-negara ASEAN mengandalkan diplomasi dan kerja sama kolektif melalui ARF untuk menahan dominasi Cina tanpa eskalasi konflik langsung.²³

²³ Atikah Inayah, Lukman Yudho Prakoso, dan Panji Suwarno, "The Role of Leadership in Regional Cooperation to Enhance the

Dalam konteks multipolaritas, ARF berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi melalui *ARF Work Plan on Maritime Security 2022–2026*, yang menekankan kerja sama maritim, pertukaran informasi, dan penegakan hukum laut. Forum ini mengedepankan *normative balancing* untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah rivalitas Cina–Amerika Serikat. Polarisasi kekuatan selama 2021–2023 juga menunjukkan proses *sekuritisasi*, di mana isu kedaulatan bergeser menjadi ancaman eksistensial. Walaupun tidak menghasilkan keputusan mengikat, ARF tetap menjadi sarana *confidence-building measure* yang menjaga komunikasi multilateral dan mencegah eskalasi, menjadikannya instrumen penting dalam mempertahankan stabilitas Laut Cina Selatan.²⁴

Tantangan dan Hambatan ASEAN Regional Forum

ARF menghadapi tantangan besar dalam menangani isu Laut Cina Selatan karena mekanisme konsensus yang cenderung menghasilkan pernyataan umum tanpa langkah konkret. Meski terjadi insiden seperti Whitsun Reef, forum ini hanya menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas tanpa menyentuh akar masalah. Fokus ASEAN juga terbagi akibat krisis politik Myanmar, sehingga ruang pembahasan isu maritim menjadi terbatas. Mekanisme konsensus ini menjaga

Effectiveness of Indonesia's Maritime Security Strategy," n.d.

²⁴ Laura Southgate, "Explaining ASEAN institutional balancing success and failure," *Asian Security* 21, no. 2 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.1080/14799855.2025.2527885>.

kesatuan formal, tetapi menghambat efektivitas ARF dalam mengambil keputusan substantif.²⁵

Selain itu, perbedaan sikap negara-negara ASEAN dan rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat semakin memperumit dinamika forum. Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan pendekatan berbeda terhadap Cina, sementara Kamboja dan Laos cenderung berpihak pada Beijing. Dalam kondisi ini, ARF tetap menjadi wadah dialog dan pembangunan kepercayaan, namun kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan masih lemah akibat keterbatasan internal dan tekanan eksternal.

Capaian dan Prospek ASEAN Regional Forum

Pada periode 2021–2023, ASEAN Regional Forum (ARF) konsisten berperan sebagai wadah diplomasi multilateral yang menekankan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap UNCLOS 1982. Meski pandemi membatasi aktivitas, ARF tetap aktif melalui pertemuan daring, penguatan implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), dan percepatan perundingan Code of Conduct (COC). Pengadopsian *Work-Plan on Maritime Security 2022–2026* serta pelaksanaan berbagai confidence-building measures memperlihatkan peran nyata ARF dalam membangun

kepercayaan dan mengurangi risiko konflik di Laut Cina Selatan.²⁶

Pada 2023, ARF menegaskan perannya sebagai pilar keamanan kawasan dengan fokus pada koordinasi maritim dan percepatan negosiasi COC yang telah memasuki tahap third reading. Meskipun perbedaan substansial masih ada, forum ini tetap menjadi instrumen diplomasi preventif yang menjaga stabilitas dan komunikasi di kawasan, sekaligus memperkuat posisi ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.²⁷

KESIMPULAN

Sengketa Laut Cina Selatan bukan hanya persoalan klaim teritorial, tetapi juga mencerminkan dinamika distribusi kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. ASEAN Regional Forum (ARF) berperan sebagai instrumen diplomasi multilateral yang menjaga komunikasi, mencegah eskalasi, dan menyediakan ruang dialog inklusif bagi pihak terkait. Pada periode 2021–2023, ARF konsisten menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui *confidence building measures* (CBMs) dan diplomasi preventif, meski perannya masih sebatas sebagai jembatan komunikasi daripada lembaga penyelesaian konflik.

²⁵ Fumiko Sasaki, "Space, Maritime Security, and Geopolitics in the South China Sea," *JOURNAL OF INDO-PACIFIC AFFAIRS* 8 (2025).

²⁶ ASEAN Regional Forum, "ASEAN Regional Forum Work Plan for Maritime Security 2022–2026," 2022.

²⁷ ASEAN Regional Forum, "ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook 2023" (Jakarta, 2024).

Dinamika dalam ARF memperlihatkan adanya pengaruh kepentingan negara anggota ASEAN dan keterlibatan kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat, sesuai dengan kerangka *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Meski forum ini belum mampu menghadirkan solusi final, ARF berkontribusi dalam mendorong kerja sama non-tradisional, seperti keamanan maritim dan pertukaran informasi, yang membantu menjaga stabilitas kawasan. Ke depan, efektivitas ARF akan sangat bergantung pada solidaritas internal ASEAN, sikap konstruktif Cina, serta komitmen semua pihak untuk menjadikan hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Saidatul Nadia, dan Salawati Mat Basir. "Decentrality of ASEAN Law to Address US-China Rivalry in the South China Sea." *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (2024): 61–88. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol.22.1.1747>.
- ASEAN Regional Forum. "ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook 2023." Jakarta, 2024.
- ASEAN Regional Forum. "Chairman's Statement of the 28th ASEAN Regional Forum 6 August 2021 via videoconference," 2021.
- ASEAN Secretariat. "Chairman's Statement of the 29th ASEAN Regional Forum, Phnom Penh, Cambodia, 5 August 2022." *ASEAN Secretariat*, no. August (2022): 1–9.
- ASEAN Regional Forum. "Chairman's Statement Of The 30th Asean Regional Forum," 2023.
- ASEAN. "Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea," 2002, 1–4.
- ASEAN Regional Forum. "Co-Chairs' Summary Report Asean Regional Forum Inter-Sessional Support Group Meeting On Confidence-Building Measures And Preventive Diplomacy (ARF ISG ON CBMs AND PD) Video Conference, 2 July 2020," 2020.
- ASEAN Regional Forum. "ASEAN Regional Forum Work Plan for Maritime Security 2022-2026," 2022.
- ASEAN. "The First ASEAN Regional Forum," 1994.
- Beckman, Robert. "China, UNCLOS and the South China Sea." *Asian Society of International Law, Third Biennial Conference, Beijing, China 27-28 August 2011*, no. August (2011): 1–32.
- Buzan, Barry, dan Ole Wæver. *Regions and Powers: The Structure of International Security. Journal of International Relations and Development*. Vol. 7, 2003. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800026>.
- Darmawan, Arthamevya Zherlindya Putri, dan Nabilla Kharisma Ardhaneswari. "Konstelasi geopolitik tiongkok di laut china selatan: studi kasus reklamasi dan militerisasi

- pulau buatan oleh tiongkok di kepulauan spratly.” *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 3 (2022): 49–76.
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. “ASEAN Blue Economy Framework.” ASEAN, *Indonesia*, 2023, 1–22.
- Fitria, Naeli. “Facing South China Sea Dispute: Where Is Asean Single Voice?” *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 12 (2023): 2979–86. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i12.495>.
- Hongbin, Ding, dan Ihsan Ullah. “the South China Sea’S Nine Dash Line: Key Disputes and China’S Historical Rights Claims.” *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)* 3, no. 1 (2022): 67–86. <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>.
- Inayah, Atikah, Lukman Yudho Prakoso, dan Panji Suwarno. “The Role of Leadership in Regional Cooperation to Enhance the Effectiveness of Indonesia’s Maritime Security Strategy,” n.d.
- Mas’oed, Mohtar. “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,” 1990.
- Mahroza, Jonni, Priyanto, dan Mhd Halkis. “Asymmetric Diplomacy and Securitization in The South China Sea.” *Andalas Journal of International Studies* 11, no. 1 (2022): 94–107. <https://doi.org/10.25077/ajis.11.1.94-107.2022>.
- Naval, Jaime. “ASEAN’s elusive code of conduct for the South China Sea.” EASTASIAFORUM, 2024. <https://eastasiaforum.org/2024/11/21/aseans-elusive-code-of-conduct-for-the-south-china-sea/>.
- Nugroho, Mohammad Alvian Adi, dan M. Miftahul Hikam. “South China Sea Claim Dispute Settlement Between Asean and China.” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i1.9478>.
- Rachmawati, Dwi Putri. “Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna.” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225>.
- Sasaki, Fumiko. “Space, Maritime Security, and Geopolitics in the South China Sea.” *JOURNAL OF INDO-PACIFIC AFFAIRS* 8 (2025).
- Southgate, Laura. “Explaining ASEAN institutional balancing success and failure.” *Asian Security* 21, no. 2 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.1080/14799855.2025.2527885>.
- “The ASEAN Regional Forum : A Concept Paper,” n.d.
- Wardhana, Rifqi Setia. “The South China Sea Conflict and Security Cooperation in ASEAN Waters.” *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 3, no. 1 (2021): 23–33.

<https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.56>.

Weissmann, Mikael. "The South China sea conflict and Sino-ASEAN relations: A study in conflict prevention and peace building." *Asian Perspective* 34, no. 3 (2010): 35–69. <https://doi.org/10.1353/apr.2010.0013>.